



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

RENSTRA
TAHUN 2025 - 2029

Alamat : Jl. MT. Haryono No.46, Alir Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
75124, Telp. 0541 733766, 741040, Fax : 0541 - 205315.

Laman: <https://bpbd.kaltimprov.go.id/web>, Posel : bpbd.kaltimprov@gmail.com

SMS Center : 0811 584 4722

SAMARINDA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas perkenannya Buku Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029 telah selesai disusun. Dokumen Sistem Perencanaan yang telah disusun dalam bentuk Renstra sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Kalimantan Timur sebagai ibu kota nusantara (IKN) menjadi semangat bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur berisi dua materi utama yaitu apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya dalam periode lima tahun ke depan dengan penekanan pada pelayanan kebencanaan dan pencapaian sasaran Standar Pelayanan Minimal.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Tim Penyusunan Renstra yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini melalui proses **top-down** dan **bottom-up** serta seluruh pihak yang telah tulus membimbing dalam penyempurnaan penyusunan buku Renstra ini. Semoga upaya yang secara maksimal telah dilakukan menjadi persembahan terbaik bagi peningkatan kinerja masa depan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan pengembangan kesehatan Kalimantan Timur pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Samarinda, 7 November 2025
Plt. Kepala Pelaksana,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

Yasir, S. E., M. Si
NIP. 19730405 1998031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS	
 PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Gambaran Pelayanan	9
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur BPBD Provinsi Kalimantan	
Timur	10
2.1.2 Sumber Daya BPBD Provinsi Kalimantan Timur	13
2.1.3 Aset BPBD Provinsi Kalimantan Timur	17
2.1.4 Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Kalimantan Timur	24
2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan	29
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	30
2.2.1 Permasalahan	30
2.2.1.1 Analisa Faktor Lingkungan Internal	32
2.2.1.2 Analisa Faktor Lingkungan Eksternal	33
2.2.1.3 Hasil Analisa SWOT	33
2.2.1.4 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala	
Daerah Terpilih	36
2.2.1.5 Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana	
(BNPB)	37
2.2.1.6 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian	
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	42
2.2.2 Isu Strategis	46
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	51
3.1 Tujuan	51

3.2	Sasaran.....	56
3.3	Strategi	58
3.4	Arah Kebijakan	59
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
	PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	61
4.1	Program	61
4.2	Kegiatan	61
4.3	Sub Kegiatan.....	62
4.4	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	90
4.4.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	90
4.4.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	92
BAB V	PENUTUP	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Tabel 2.2	Klasifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan....	14
Tabel 2.3	Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Jabatan	14
Tabel 2.4	Data Barang Milik Daerah.....	17
Tabel 2.5	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2024 Provinsi Kalimantan Timur	26
Tabel 2.6	Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2024 Provinsi Kalimantan Timur	27
Tabel 2.7	Rasio Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021 – 2024	28
Tabel 2.8	Kelompok Sasaran Layanan	29
Tabel 2.9	Ringkasan Permasalahan Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim	35
Tabel 2.10	Strategi Penanggulangan Bencana dalam RENAS PB Tahun 2025 – 2029	42
Tabel 2.11	Matrix Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.....	46
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029.....	52
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Ranwal Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.....	57
Tabel 3.3	Penahapan Renstra	58
Tabel 3.4	Arah Kebijakan	59
Tabel 4.1	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	65
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	80
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	88
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.....	91
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Provinsi Kalimantan Timur.....	92
--------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	11
Gambar 2.2	Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	12
Gambar 2.3	Metode Perhitungan Indikator Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Terhadap PDB	38
Gambar 2.4	Peran Indeks Ketahanan Daerah dalam Kajian Risiko Bencana dan Indeks Risiko Bencana Indonesia	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029 dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 000.7.2.4/4566/Bapp-II Tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, serta penyesuaian terhadap Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Undang – Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termasuk didalamnya adalah atas terjadinya bencana. Dinyatakan pula Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah pada pasal 15 ayat 3 huruf e dinyatakan bahwa urusan penanggulangan bencana menjadi wajib bagi pemerintah dalam pemenuhan pelayanan dasar khususnya untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, Penanggulangan bencana merupakan urusan wajib bersama dengan pelibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, disebutkan pula bahwa Provinsi Kalimantan Timur mendapat 11 (Sebelas) lokasi prioritas, salah satunya adalah Pengelolaan risiko dan mitigasi bencana alam yang efisien dan tepat guna, melalui :

1. Mitigasi bencana di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan output: koordinasi, pelayanan publik lainnya dan dukungan teknis bidang lingkungan hidup penanggulangan bencana;
2. Pelaksanaan bantuan kebencanaan, dengan output. analisis pengembangan strategi penanggulangan bencana;
3. Pengembangan mitigasi berbasis alam, dengan output: koordinasi bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana serta pelayanan publik lainnya bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
4. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah penanggulangan bencana, dengan output: pendidikan dan pelatihan teknis Penanggulangan Bencana (PB), daerah yang menerapkan SPM sub urusan bencana, pendidikan dan pelatihan teknis PB bagi fasilitator nasional dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas dalam penanganan pengungsi;
5. Penyusunan dokumen penanggulangan bencana, dengan output: analisis pengembangan strategi, rekomendasi kebijakan dan analisis strategi penanggulangan bencana;
6. Peningkatan keandalan bangunan berketahanan bencana, dengan output: pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan lingkungan, pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pasca bencana, penataan bangunan kawasan rawan bencana dan daerah yang difasilitasi dalam percepatan dan pengendalian Pelaksanaan Bangunan Gedung (PBG) berketahanan bencana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025 – 2045, dari 17 (Tujuh Belas) arah pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur mendukung salah satu arah pembangunan yaitu Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim dengan indikator utama pembangunan Indeks Risiko Bencana.

Jika penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistemik, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanggulangan akibat bencana dan meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat. Hal ini karena penanganan bencana yang sistemik dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya.

Terlebih dewasa ini paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai tindak lanjut dari Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007, dimana dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana ditangani oleh BPBD. Kebijakan penanggulangan bencana perlu diakomodasikan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, politik, keamanan dan lingkungan.

Berdasarkan Visi Dan Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029, dalam rangka proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 000.7.2.4/4566/Bapp-II Tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen pengurangan risiko bencana. Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana

adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan pra bencana, tanggap darurat pada saat terjadi bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Rencana Strategis dalam pengertiannya disimpulkan sebagai keputusan mendasar dan spesifik organisasi untuk lima tahun ke depan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan strategis. Sebagai suatu proses yang berkenaan dengan cara usaha menguasai dan mendayagunakan segala sumberdaya suatu masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan. Rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengkaitkan keunggulan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan tujuan organisasi dan dapat dipakai melalui pelaksanaan yang tepat.

Pembangunan yang pesat di segala bidang telah menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan alam, sosial, budaya dan politik masyarakat serta teknologi yang dapat memicu dan berisiko bencana, seperti tidak ditaatinya rencana tata ruang, pengusahaan sumberdaya alam yang kurang memperhatikan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan kelestarian lingkungan, permasalahan sosial, masalah tenaga kerja, gagal teknologi dan lain-lain.

Kondisi Kalimantan Timur secara empiris dapat dilihat dengan perubahan kondisi biogeofisik alam, pemanasan global dan perubahan iklim, degradasi sumberdaya alam dan lingkungan menimbulkan berbagai fenomena alam yang memicu terjadinya bencana, seperti *El Nino* merupakan kondisi dimana suatu wilayah mengalami kekeringan/kemarau panjang yang berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta gangguan asap; sedangkan *La Nina* merupakan kondisi curah hujan melebihi normal (*Ubnormal*) sehingga berpotensi menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor. Adapun dampak lainnya yang ditimbulkan dari El-Nino dan La Nina termasuk juga kerawanan pangan, timbulnya hama dan penyakit.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini disusun berdasarkan landasan hukum, yaitu :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4723);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019, Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 -2036;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025 – 2045;
22. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 000.7.2.4/4566/Bapp-II, Tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Maksud

- a) Memberikan arah kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

- b) Mengidentifikasi daerah berisiko tinggi dari berbagai bencana yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan menyusun pilihan tindakan yang perlu mendapat perhatian utama terhadap fokus prioritas didalam menjalankan program kegiatan, dan anggaran indikatif yang diperlukan.

2. Tujuan

- a) Untuk menetapkan program dan kegiatan prioritas yang strategis selama 5 (lima) tahun;
- b) Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan;
- c) Sebagai acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan koordinasi dengan perangkat pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Timur agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2025 – 2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. yaitu terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Mensajikan data – data dan informasi terkait pelaksanaan urusan kebencanaan selama 5 (lima) tahun terakhir, Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama 5 (lima) tahun terakhir, serta

mengidentifikasi masalah pokok, permasalahan, akar masalah, dan isu strategis (Global, Nasional, dan Regional)

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah tahun 2025 – 2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja perangkat daerah tahun 2025 – 2029

BAB V PENUTUP

Menjelaskan kaidah pelaksanaan RENSTRA yang mencakup peran dokumen RENSTRA dalam pelaksanaan pembangunan, konsistensi antara dokumen RENSTRA dengan dokumen rencana pembangunan lainnya, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RENSTRA.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang menyelenggarakan tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung terhadap visi dan misi Gubernur, sebagai berikut :

a. Visi

Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas.

- b. Misi
 - 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera;
 - 2. Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat ekonomi baru yang inklusif berbasis industrialisasi komoditas unggulan daerah;
 - 3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan publik dan kesehatan;
 - 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, professional dan berintegritas berbasis teknologi informasi ;
 - 5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal;
 - 6. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

2.1.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur BPBD Provinsi Kalimantan Timur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009, terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat membawahkan :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Umum;
 - c) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan :
 - a) Seksi Pencegahan;
 - b) Seksi Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 - a) Seksi Penanganan Darurat;
 - b) Seksi Logistik dan Peralatan;

- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 - a) Seksi Rehabilitasi;
 - b) Seksi Rekonstruksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1

Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: Lampiran I Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2009

Pada tahun 2023, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengalami pemutakhiran sebagaimana gambar di bawah ini :

Gambar 2.2
Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur



Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2023 bahwa masing masing jabatan struktural mempunyai tugas sebagai berikut ;

a. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penanggulangan bencana.

b. Sekretaris

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

c. Kepala Subbagian Umum

Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

d. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

e. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang kedaruratan dan logistik.

f. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

2.1.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan melakukan berbagai upaya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia, aset, maupun modal.

Sumber Daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non ASN, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 2.1
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Pria	Wanita	Sub Total
Tenaga ASN (PNS dan PPPK)				
1	SD	0	0	0
2	SMP	0	0	0
3	SMA	5	1	6
4	D1/D3	1	1	2
5	S1/D4	20	7	18
6	S2	9	1	10
7	S3	0	0	0
Jumlah		35	10	45
Tenaga Non ASN				
1	SD	0	0	0
2	SMP	0	0	0
3	SMA	24	5	29
4	D1/D3	1	1	2

No.	Jenis Pendidikan	Pria	Wanita	Sub Total
5	S1/D4	12	1	13
6	S2	0	0	0
7	S3	0	0	0
Jumlah		37	7	44
Total Keseluruhan				89

Sumber: BPBD Provinsi Kaltim, Tahun 2024

Tabel 2.2
Klasifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Pria	Wanita	Jumlah
A.	PNS			
1	I	0	0	0
2	II	2	1	3
3	III	19	5	24
4	IV	9	0	9
B.	PPPK			
1	IX	5	4	9
Jumlah Total		35	10	45

Sumber: BPBD Provinsi Kaltim, Tahun 2024

Tabel 2.3
Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Jabatan

No	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Bezzetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan	+/-
1	Struktural	Kepala Pelaksana	1	1	0
		Sekretaris	1	1	0
		Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	1	0
		Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	0	1	-1
		Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	1	0
		Kepala Sub Bagian Umum	1	1	0
2	Fungsional	Analisis Kebencanaan Ahli Madya	1	5	-4
		Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya	0	4	-4
		Analisis Kebencanaan Ahli Muda	1	7	-6
		Analisis Kebijakan Ahli Muda	6	6	0

No	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Bezzetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan	+/-
		Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	1	8	-7
		Perencana Ahli Muda	2	2	0
		Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	2	11	-9
		Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	8	15	-7
3	Pelaksana PNS	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	1	1	0
		Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	1	1	0
		Bendahara	1	1	0
		Penyusun Rencana Mitigasi dan Adaptasi	1	2	-1
		Penyusun Kebutuhan Barang dan Inventaris	1	1	0
		Penyiap Bahan Kegiatan Kesiapsiagaan	1	1	0
		Pengelola Bahan Perencanaan	1	1	0
		Pengelola Kepegawaian	1	2	-1
		Pengelola Monitoring dan Evaluasi	1	1	0
		Pengadministrasi Keuangan	1	1	0
		Pengadministrasi Penerimaan	1	1	0
		Pengadministrasi Persuratan	1	1	0
		Pengadministrasi Kepegawaian	1	1	0
		Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	1	0
		Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor	0	1	-1

No	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Bezzetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan	+/-
		Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor	1	1	0
		Pengadministrasi Umum	4	4	0
4	Pelaksana PPPK	Penata Layanan Operasional	0	13	-13
		Pengelola Layanan Operasional	0	2	-2
		Operator Layanan Operasional	0	23	-23
		Pengadministrasi Perkantoran	0	6	-6
Total			45	130	-85

Sumber: BPBD Provinsi Kaltim, Tahun 2024

Berdasarkan data tersebut diatas, sumber daya manusia yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 89 Orang pegawai terdiri dari pegawai ASN (PNS dan PPPK) dan Tenaga Non ASN, dan di tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mengusulkan untuk pengangkatan pegawai ASN bagi tenaga Non ASN untuk menduduki 4 (empat) jabatan pelaksana Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) meliputi Penata Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, Pengadministrasi Perkantoran dan Operator Layanan Operasional. Secara Kebutuhan bahwa sumber daya manusia pada tingkat pelaksana telah mencukupi, namun pada tingkat fungsional masih ada beberapa jabatan yang perlu dilakukan pengisian dengan :

1. Mengoptimalkan alih status jabatan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Mengusulkan Rekrutmen pegawai berdasarkan kebutuhan analisa jabatan yang belum terisi.

2.1.3. Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Barang Milik Daerah (BMD) yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur perolehan berasal dari pengadaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Data Barang Milik Daerah

NO	NAMA BARANG	EXT	KONDISI	
			B	R
I	PERALATAN DAN MESIN	150	134	17
1	COMPACTING EQUIPMENT	1	0	1
	- Soil Stabilizer	1	0	1
2	ALAT PENGANGKAT	1	1	0
	- Forklift	1	1	0
3	MESIN PROSES	1	2	0
	- Water Treatment (Mesin Proses)	1	2	0
4	COMPRESSOR	1	1	0
	- Portable Compressor	1	1	0
5	ELECTRIC GENERATING SET	4	4	0
	- Portable Generating Set	1	1	0
	- Electric Generating Set (Dst)	3	3	0
6	POMPA	9	9	0
	- Portable Water Pump	1	1	0
	- Pompa Air	8	8	0
7	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN	14	14	0
	- Pompa Portable	2	2	0
	- Kantong Air	12	12	0
8	PERALATAN SAR MOUNTENERING	1	1	0
	- Peralatan Sar Mountenering (Dst)	1	1	0
9	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	13	8	5
	- Station Wagon	12	8	4
	- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Dst)	1	0	1
10	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	1	1	0
	- Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	1	0
11	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	6	5	1
	- Truck + Attachment	1	1	0
	- Pick Up	3	2	1
	- Yeengler/Trailer	1	1	0
	- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Dst)	1	1	0
12	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	18	8	10
	- Sepeda Motor	18	8	10

NO	NAMA BARANG	EXT	KONDISI	
			B	R
13	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	9	9	0
	- Mobil Ambulance	1	1	0
	- Mobil Tangki Air	2	2	0
	- Mobil Unit Satelite Link Van	1	1	0
	- Kendaraan Toilet	1	1	0
	- Mobil Dapur Lapangan	1	1	0
	- Rescue Car	2	2	0
	- Kendaraan Bermotor Khusus (Dst)	1	1	0
14	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	1	1	0
	- Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya (Dst)	1	1	0
15	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	2	2	0
	- Gerobak Tarik	2	2	0
16	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	5	5	0
	- Tandu dorong	5	5	0
17	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	5	5	0
	- Speed Boat / Motor Tempel	1	1	0
	- Motor Boat	4	4	0
18	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG	11	11	0
	- Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Barang (Dst)	11	11	0
19	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	3	3	0
	- Perahu Penumpang	2	2	0
	- Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang (Dst)	1	1	0
20	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS	5	5	0
	- Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	5	5	0
21	KAPAL TERBANG	1	1	0
	- Amphibi	1	1	0
22	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	2	2	0
	- Mesin Kompresor	1	1	0
	- Mesin Pelubang (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi)	1	1	0
23	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	1	1	0
	- Perkakas Bengkel Listrik (Dst)	1	1	0
24	PERKAKAS BENGKEL KAYU	5	5	0
	- Gergaji Chain Saw	5	5	0
25	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	1	1	0
	- Perkakas Bengkel Service (Dst)	1	1	0
26	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA	11	11	0
	- Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya (Dst)	11	11	0
27	ALAT UKUR UNIVERSAL	4	4	0
	- Multitester & Accessorie	1	1	0
	- Global Positioning System	3	3	0
28	ALAT KALIBRASI	1	1	0
	- Test Generator	1	1	0
29	ALAT UKUR LAIN0LAIN	13	13	0
	- Alat Ukur Lain0lain (Dst)	13	13	0

NO	NAMA BARANG	EXT	KONDISI	
			B	R
II	ALAT PERTANIAN	35	15	20
1	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	13	13	0
	- Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	13	13	0
2	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	22	2	20
	- Lemari Penyimpan	20		20
	- Lemari Penyimpan	2	2	0
III	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	188	169	18
1	MESIN KETIK	11	10	1
	- Mesin Ketik Manual Portable (11013 Inci)	9	8	1
	- Mesin Ketik Listrik	2	2	0
2	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	1	1	0
	- Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	1	0
3	ALAT REPRODUKSI (PENGKANDAAAN)	1	1	0
	- Mesin Fotocopy Lainnya	1	1	0
4	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	126	118	8
	- Lemari Besi/Metal	53	45	8
	- Lemari Kayu	5	5	0
	- Rak Besi	20	20	0
	- Filing Cabinet Besi	36	36	0
	- Brandkas	5	5	0
	- Lemari Kaca	7	7	0
5	ALAT KANTOR LAINNYA	49	39	9
	- CCTV 0 Camera Control Television System	24	24	0
	- White Board	4	3	1
	- Alat Penghancur Kertas	11	4	7
	- Alat Penghancur Kertas	1		1
	- Mesin Absensi	1	1	0
	- LCD Projector/Infocus	4	4	0
	- Alat Perekam Suara (Voice Pen)	1	1	0
	- Papan Nama Instansi	2	1	0
	- Papan Absen	1	1	0
IV	ALAT RUMAH TANGGA	700	633	72
1	MEUBELAIR	161	156	5
	- Meja Kerja Besi/Metal	1	1	0
	- Kursi Besi/Metal	1	1	0
	- Meja Rapat	24	24	0
	- Tempat Tidur Besi	57	55	2
	- Meja Resepsionis	5	4	1
	- Meja Makan Besi	1	1	0
	- Kursi Rapat	34	34	0
	- Kursi Tamu	5	5	0
	- Kursi Putar	20	20	0
	- Sofa	13	11	2
2	ALAT PEMBERSIH	4	4	0

NO	NAMA BARANG	EXT	KONDISI	
			B	R
	- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	2	0
	- Mesin Pemotong Rumput	2	2	0
3	ALAT PENDINGIN	50	38	12
	- Lemari Es	12	12	0
	- A.C. Split	29	20	9
	- Kipas Angin	2	2	0
	- Alat Pendingin (Dst)	7	4	3
4	ALAT DAPUR	45	5	40
	- Rice Cooker (Alat Dapur)	40	0	40
	- Alat Dapur (Dst)	5	5	0
5	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	427	417	15
	- Televisi	20	13	7
	- Amplifier	1	1	0
	- Equalizer	1	1	0
	- Loudspeaker	1	6	0
	- Sound System	8	6	2
	- Wireless	1	1	0
	- Megaphone	3	3	0
	- Microphone	2	1	1
	- Mic Conference	8	8	0
	- Camera Video	1	1	0
	- Camera film	10	10	0
	- Tiang Bendera	6	6	0
	- Tangga Aluminium	1		1
	- Dispenser	5	1	4
	- Lambang Instansi	1	1	0
	- Handy Cam	7	7	0
	- Bracket Standing Peralatan	3	3	0
	- Alat Rumah Tangga Lainnya (home Use) (Dst)	348	348	0
6	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	13	13	0
	- Alat Pemadam/Portable	1	1	0
	- Pompa Kebakaran/Portable	12	12	0
V	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	86	86	0
1	MEJA KERJA PEJABAT	53	53	0
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	16	16	0
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5	5	0
	- Meja Kerja Pejabat (Dst)	32	32	0
2	MEJA RAPAT PEJABAT	2	2	0
	- Meja Rapat Pejabat (Dst)	2	2	0
3	KURSI KERJA PEJABAT	27	27	0
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	27	27	0
4	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	4	4	0
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	4	4	0
VI	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	598	562	36

NO	NAMA BARANG	EXT	KONDISI	
			B	R
VI.1	ALAT STUDIO	132	120	12
1	PERALATAN STUDIO AUDIO	14	12	2
	- Audio Mixing Stationer	2	2	0
	- Audio Amplifier	1	1	0
	- Microphone/Wireless MIC	1		1
	- Power Supply Microphone	2	2	0
	- Professional Sound System	1	1	0
	- Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	6	1
2	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	35	29	6
	- Camera Electronic	4	4	0
	- Video Tape Recorder Stationer	1	1	0
	- Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	1	1	0
	- Rak Peralatan	3	3	0
	- Tripod Camera	5	5	0
	- Camera Film	1	1	0
	- Lensa Kamera	1	1	0
	- Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	1	1	0
	- Automatic Emergency Light	5		5
	- Layar Film/Projector	7	6	1
	- Camera Under Water	1	1	0
	- Camera Digital	3	3	0
	- Video Conference	1	1	0
	- LCD Monitor	1	1	0
3	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	4	4	0
	- Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	2	2	0
	- Kamera Udara	2	2	0
4	ALAT STUDIO LAINNYA	1	1	0
	- Alat Studio Lainnya (Dst)	1	1	0
5	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	32	29	3
	- Telephone (PABX)	1		1
	- Handy Talky (HT)	1	1	0
	- Handy Talky (HT)	25	23	2
	- Handy Talky (HT)	3	3	0
	- Handy Talky (HT)	1	1	0
	- Alat Komunikasi Telephone (Dst)	1	1	0
6	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	8	8	0
	- Unit Tranceiver Ssb Stationery	3	3	0
	- Alat Komunikasi Radio Ssb (Dst)	5	5	0
7	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM	14	13	1
	- Alat Komunikasi Radio Hf/fm (Dst)	14	13	1
8	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	3	3	0
	- Alat Komunikasi Radio Vhf (Dst)	3	3	0
9	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF	16	16	0
	- Alat Komunikasi Radio Uhf (Dst)	16	16	0

NO	NAMA BARANG	EXT	KONDISI	
			B	R
10	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS	5	5	0
	- Alat Komunikasi Khusus (Dst)	5	5	0
VI.2	PERALATAN PEMANCAR	172	172	0
1	PERALATAN ANTENA HF/SW	11	11	0
	- Peralatan Antena Hf/sw (Dst)	11	11	0
2	PERALATAN ANTENA UHF	1	1	0
	- Antene UHF Stationary	1	1	0
3	PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF	1	1	0
	- Antene Penerima VHF	1	1	0
4	SUMBER TENAGA	12	12	0
	- Genset	5	5	0
	- Solar Cell	7	7	0
5	ALAT KEDOKTERAN UMUM	12	12	0
	- Tensimeter	2	2	0
	- Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	2	2	0
	- Senter	4	4	0
	- Alat Kedokteran Umum (Dst)	4	4	0
6	ALAT KEDOKTERAN BEDAH	1	1	0
	- Alat Kedokteran Bedah (Dst)	1	1	0
7	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	3	3	0
	- Instrument Trolley, Stainless Steel	2	2	0
	- Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan (Dst)	1	1	0
8	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	2	2	0
	- Oxygen Tank	2	2	0
9	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	17	17	0
	- Emergency Kit	17	17	0
10	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	2	2	0
	- Stabilizer	2	2	0
11	ALAT LABORATORIUM KIMIA	6	6	0
	- Preasure Sterilizer	6	6	0
12	ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGI	1	1	0
	- Pressure Chamber	1	1	0
13	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	10	10	0
	- Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	10	10	0
14	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN	65	65	0
	- Alat Selam	65	65	0
15	ALAT LABORATORIUM LAIN	20	20	0
	- Meja Kerja	20	20	0
16	ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM	1	1	0
	- Scanner (Assembly/counting System)	1	1	0
17	SYSTEM/POWER SUPPLY	4	4	0
	- Uninterupted Power Supply (UPS)	4	4	0
18	PROTEKSI LINGKUNGAN	2	2	0
	- Sirine (Proteksi Lingkungan)	2	2	0

NO	NAMA BARANG	EXT	KONDISI	
			B	R
19	ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK	1	1	0
	- DC / AC Power Supply	1	1	0
VI.3	PERSENJATAAN NON SENJATA API	294	270	24
1	ALAT KEAMANAN	124	124	0
	- Alat Khusus Surta (Survey Dan Pemetaan)	123	123	0
	- Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	1	0
2	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	1	1	0
	- Kamera Digital	1	1	0
3	KOMPUTER JARINGAN	1	1	0
	- Mainframe (Komputer Jaringan)	1	1	0
4	PERSONAL KOMPUTER	81	61	20
	- P.C Unit	25	14	11
	- Lap Top	18	17	1
	- Note Book	37	29	8
	- Tablet PC	1	1	0
5	PERALATAN MAINFRAME	1	0	1
	- Plotter (Peralatan Mainframe)	1	0	1
6	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	36	36	0
	- CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	1	0
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	26	26	0
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	6	0
	- External/ Portable Hardisk	3	3	0
7	PERALATAN JARINGAN	12	12	0
	- Server	3	3	0
	- Router	2	2	0
	- Hub	5	5	0
	- Switch	1	1	0
	- Acces Point	1	1	0
8	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	1	1	0
	- Peralatan Komputer Lainnya (Dst)	1	1	0
9	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN	31	31	0
	- Tenda	31	31	0
10	ALAT SAR LAINNYA	2	2	0
	- Alat Sar Lainnya (Dst)	2	2	0
11	PERALATAN PERMAINAN	4	1	3
	- Alat Tennis Meja	2	1	1
	- Peralatan Permainan (Dst)	2	0	2

Kondisi aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sampai saat ini dalam kondisi baik, namun ada beberapa yang harus segera dilakukan pemerajaan dan bahkan dilakukan pengadaan atau penggantian terhadap aset yang sudah tidak layak pakai. Aset yang segera dilakukan optimalisasi untuk mendukung kinerja terutama pada sub komponen Peralatan Dan Mesin pada

Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Kendaraan Bermotor Angkutan Barang dan Kendaraan Bermotor Beroda Dua.

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 dalam rangka mengoptimalkan operasional aset adalah dengan mempersiapkan upaya penghapusan dan memohon kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan penilaian terhadap aset yang dihapus dan nantinya menjadi dasar sebagai bahan pertimbangan dan persetujuan sekretaris daerah untuk diperbolehkannya bagi Perangkat Daerah mengusulkan pengadaan baru.

Terhadap Aset yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sejak berdiri pada tahun 2009 sampai dengan saat sekarang belum memiliki aset tetap baik tanah maupun bangunan kantor. Aset yang sekarang ditempati merupakan aset yang masih dikelola oleh Kementerian Kehutanan, yang setiap tahunnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan pinjam pakai atas penggunaan aset tersebut. Penguatan Kelembagaan merupakan pilar fundamental dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, salah satu pilarnya adalah status kepemilikan kantor yang referesentatif, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur saat ini sangat membutuhkan hal tersebut, dan hal ini sudah termaktub kedalam sasaran prioritas pada program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi dan menjadi bagian rencana aksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Renstra 2025-2029.

2.1.4. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana Provinsi

Capaian Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan pada arah atau tema pembangunan yang tercantum dalam RPJMD 2019 – 2023 dan RPD 2024 – 2026 Provinsi Kalimantan Timur.

Penyelenggaraan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan standar teknis pelayanan dan standar pelayanan minimal yang diberikan, dalam hal ini BPBD Provinsi Kalimantan Timur melakukan upaya dan langkah-langkah yang mengarah pada Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana.

Program yang dilaksanakan dari tahun 2019-2024 telah dijabarkan pada kegiatan-kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 4 kegiatan yaitu; Layanan Informasi Rawan Kebencanaan, Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Layanan Penyelamatan dan Evakuasi serta Layanan Penataan Sistem Dasar, dimana kegiatan layanan tersebut memfokuskan pada Indikator yang telah dirumuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang didalam Rencana Strategis Perangkat Daerah serta Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Tabel 2.5

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2024 Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
RENSTRA 2019 - 2023																
1	Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana		N/A	85	85	85		N/A	98.04	100	100		N/A	115.3	117.6	117.6
2	Indeks Kepuasan Masyarakat		N/A	80	80	80		N/A	78.37	80.46	82.89		N/A	97.96	100.6	103.6
RENSTRA 2024 - 2026																
1	Indeks Ketahanan Daerah	0.633	0.733	0.833			0.53					83.73				
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	70.01	71	72			70.7					101				

Berdasarkan Rencana Strategis Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2019 sampai tahun 2024 terdapat perbedaan indikator dan target capaian IKU, dimana perubahan tersebut merupakan reviu kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah. Capaian Kinerja yang ditetapkan pada masing-masing priode tersebut secara rata rata mencapai target yang ditetapkan. Jika dilihat capaian kinerja pada Priode renstra 2024-2026 pada sasaran Indeks Ketahanan Daerah yang mencapaian 0.43 indeks dari target yang ditetapkan sebesar 0.63 indeks , belum mencapai 100 % (83,73%). Bila diukur capaian kinerja berdasarkan target tujuan strategis, BPBD Provinsi Kaltim ditahun 2024 telah tercapai (Target IRB 2024 : 144,47; Realisasi IRB 2024 : 136,11), namun sasaran strategis yang merupakan arah kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut pada saat menetapkan target tidak tercapai, hal ini disebabkan oleh adanya ketidaktepatan pada saat melakukan analisa rumusan pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 yang mengakibatkan penetapan besaran target sasaran tidak berbanding lurus atau kurang tepat dalam menetapkan angka konversi dengan besaran target tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.6
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2019-2024 Provinsi Kalimantan Timur

No	Uraian	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Ke -				Realisasi Capaian Tahun Ke -				Rasio Capaian Tahun Ke -			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	3	2	2	2	1	2	2	2	33.3	100	100	100
2	Persentase penanganan pra bencana	10	10	10	10	7	10	10	10	70	100	100	100
3	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100

Berdasarkan capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) bahwa diakhir tahun 2024, persentase capaian IKK Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 100 %, sebagai berikut :

- a. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal adalah berupa dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dasar

memahami tingkat kerentanan (*vulnerability*), ancaman (*hazard*), dan kapasitas (*capacity*) suatu wilayah terhadap bencana dalam menentukan langkah-langkah pengurangan risiko yang diimplementasikan dengan efektif melalui Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

- b. Persentase Penanganan Pra Bencana yang memfasilitasi penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengacu pada Permendagri 59 tahun 2021 dan terfasilitasi di 10 Kabupaten/Kota.
- c. Persentase penanganan tanggap darurat juga sudah terfasilitasi dengan penanganan bencana terhadap wilayah yang terdampak bencana.

Tabel 2.7
Rasio Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021 – 2024

Tahun	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Rasio Capaian Realisasi Anggaran
2021	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	12,661,749,990	10,750,461,267	84.91
	Program Penanggulangan Bencana	3,013,732,010	2,395,860,262	79.50
2022	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	14,466,946,420	12,481,797,782	86.28
	Program Penanggulangan Bencana	4,013,345,907	3,843,054,179	95.76
2023	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	19,518,548,419	18,390,131,258	94.22
	Program Penanggulangan Bencana	38,777,112,260	38,247,872,677	98.64
2024	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	22,986,878,928	21,645,896,838	94.17
	Program Penanggulangan Bencana	73,205,884,356	72,493,051,843	99.03

Capaian Rasio Capaian Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024, secara keseluruhan rata-rata mencapai 91,56%. Pada tabel 2.6 tersebut diatas juga digambarkan bahwa pada tahun 2023 dan 2024 mengalami lonjakan anggaran yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penambahan anggaran tersebut dipengaruhi oleh faktor adanya dukungan dari komitmen DPRD melalui Dana Aspirasi untuk pengurangan Risiko Bencana.

2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan

Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah dalam perencanaan kebijakan pembangunan di 5 tahun kedepan (2025 – 2029), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana memiliki kelompok sasaran layanan pada arah tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Tabel 2.8
Kelompok Sasaran Layanan

No	Program	Kegiatan	Kelompok Sasaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ASN Provinsi Kalimantan Timur
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ASN Provinsi Kalimantan Timur
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	ASN Provinsi Kalimantan Timur
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ASN Provinsi Kalimantan Timur
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	ASN Provinsi Kalimantan Timur
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ASN Provinsi Kalimantan Timur
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ASN Provinsi Kalimantan Timur
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ASN Provinsi Kalimantan Timur
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Masyarakat, Aparatur dan kelompok rentan Provinsi Kalimantan Timur
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelajar, Pendidik, Aparatur, ASN, relawan dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur

No	Program	Kegiatan	Kelompok Sasaran
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Aparatur, relawan, Masyarakat, akademisi, media massa dan Dunia Usaha Provinsi Kalimantan Timur

Kelompok sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Tiga fungsi berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu sebagai Koordinator yang membawahi BPBD Kabupaten/Kota dalam memperkuat kapasitas daerah, Pelaksana yang berfokus pada pemberian layanan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan fungsi Komando dalam penanganan suatu bencana.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

Pengidentifikasian permasalahan pembangunan dan isu strategis berperan penting dalam merumuskan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun. Pemetaan yang akurat terhadap permasalahan pembangunan menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan yang menyeluruh. Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara realita atau kondisi pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Sementara isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

2.2.1. Permasalahan

Tujuan dalam dokumen perencanaan pada umumnya merumuskan beberapa masalah yang ada dalam organisasi sekaligus sebagai bahan untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut. Hasil dari identifikasi masalah yang telah dipecahkan dapat menjadi tujuan dalam dokumen perencanaan strategis dengan penelusuran dan penajaman agar dapat memisahkan antara masalah pokok, masalah dan akar masalah. Pada beberapa kejadian permasalahan tidak berhasil diidentifikasi secara tepat karena ketidakmampuan dalam mengurai masalah pokok, masalah dan akar masalah. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 telah memberikan panduan yang jelas dalam mengurai permasalahan menjadi akar-akar masalah dan selanjutnya merumuskannya menjadi

permasalahan pokok yang akhirnya menjadi tujuan pelayanan organisasi perangkat daerah.

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan tantangan kebencanaan dimasa mendatang yang akan semakin kompleks. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dibentuk sebagai respon terhadap perubahan paradigma Penanggulangan Bencana yaitu dari paradigma tanggap darurat ke paradigma pengurangan risiko bencana. Penanggulangan bencana tidak lagi dipahami dan dilaksanakan hanya sebagai kegiatan tanggap darurat pada saat terjadi bencana, melainkan harus dipahami dan dilaksanakan dengan memberi prioritas pada pengurangan risiko bencana. Karena itu penanggulangan bencana harus dilaksanakan pada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana, serta menempatkan kerentanan wilayah sebagai subyek yang harus ditingkatkan kapasitasnya dalam menghadapi ancaman bencana. Guna mengukur tingkat keberhasilan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko perlu adanya analisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan, tidak hanya itu adanya perhitungan terkait nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi yang diikuti dengan situasi dan kondisi lingkungannya juga perlu dimasukkan kedalam hasil analisis. Untuk mendapatkan hasil analisis tersebut maka perlu analisis yang melihat pada Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman di dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Permasalahan yang ditemui di setiap bidang dapat dianggap sebagai akar masalah yang selanjutnya dirumuskan berdasarkan analisis penyelenggaraan layanan yang diberikan selama ini sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban pada setiap bidang. Dari akar masalah yang berhasil dirumuskan oleh setiap bidang, kemudian disusun satu narasi kalimat yang juga harus padat dan jelas untuk dijadikan masalah pada setiap bidang yang kemudian akan menjadi keseluruhan akar masalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan memiliki beberapa masalah untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Irisan akar masalah pada Bidang akan menjadi permasalahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang disepakati untuk diselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan bencana kebencanaan di Provinsi Kalimantan Timur diantaranya adalah :

1. Kondisi alam Kalimantan Timur yang sangat luas dengan berbagai kondisi biologis, geologis, geografis, hidrologis, klimatologis beragam merupakan wilayah yang rawan bencana dan permasalahan tersendiri dalam penanggulangannya.
2. Belum optimalnya performa kelembagaan baik lingkup Struktur Organisasi, Standar Type, Unit Pelaksana, dan status kelayakan kantor.
3. Belum maksimalnya penerapan penanganan kejadian bencana yang ditangani oleh berbagai lembaga/instansi yang disepakati bersama.
4. Kurangnya memadainya sumber daya, baik sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
5. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparaturnya dan masyarakat tentang pentingnya Pengurangan Risiko Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana dihadapkan dengan permasalahan yang cukup kompleks dari faktor lingkungan internal dan faktor eksternal, adapun penjelasannya sebagai berikut :

2.2.1.1. Analisa Faktor Lingkungan Internal

1. Kekuatan (*Strength*)
 - a. Tersedianya regulasi yang mendukung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. Pengurangan Risiko Bencana sudah menjadi bagian penunjang dalam capaian pembangunan daerah
 - c. Tersedianya sumber anggaran pada setiap tahunnya;
2. Kelemahan (*Weakness*)
 - a. Belum tersedianya Sarana Gedung Kantor dan fasilitas lainnya dalam menunjang kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 - b. Kurang memadainya Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan fenomena alam.
 - c. Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana di dalam melakukan pelayanan;
 - d. Lemahnya inovasi teknologi Penanggulangan Bencana yang telah existing atau sudah berdampak pada Penanggulangan Bencana dalam

memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan bencana, dan pasca pemulihan.

- e. Belum optimalnya fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan.
- f. Belum optimalnya jalinan kemitraan luar negeri dalam penanggulangan bencana.

2.2.1.2. Analisa Faktor Lingkungan Eksternal

1. Kesempatan (Opportunity)

- a. Adanya kemitraan dalam penanggulangan bencana baik dari pemerintah, lembaga, dan masyarakat;
- b. Adanya kemudahan dalam mengakses pemanfaatan teknologi informasi kebencanaan dengan memanfaatkan website penanggulangan bencana;
- c. Adanya kepercayaan masyarakat, dukungan DPRD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penanggulangan bencana;
- d. Terintegrasinya pengurangan risiko bencana dengan visi misi gubernur terpilih

2. Ancaman (Threat)

- a. Luasnya cakupan wilayah pengawasan dan fenomena alam yang sulit diprediksi;
- b. Terbatasnya aksesibilitas dan konektivitas untuk mencapai lokasi bencana sehingga mengakibatkan risiko kerja sangat tinggi;
- c. Masih terdapat desa yang berada di daerah rawan bencana;
- d. Masyarakat mudah terpengaruh HOAX (kemajuan teknologi)
- e. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital
- f. Penggunaan dan pemanfaatan tata ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur.

2.2.1.3. Hasil Analisa SWOT

Berdasarkan hasil analisa SWOT diatas bahwa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur berada pada Quadran 3 (Diversifikasi) yang disarankan untuk memperbanyak ragam strategi taktisnya dengan beberapa alasan dan manfaatnya :

1. Alasan

- a. Meningkatkan Fleksibilitas: Dengan memiliki banyak strategi penanggulangan bencana terutama pada penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemulihan lebih cepat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat lebih fleksibel dalam menghadapi situasi penanggulangan bencana di daerah.
- b. Mengurangi Ketergantungan: Memiliki banyak strategi penanggulangan bencana dapat mengurangi ketergantungan terutama pada keterbatasan anggaran dengan memperkuat kerjasama multi pihak (Pemerintah, Dunia Usaha, Akademisi, Media dan masyarakat).
- c. Meningkatkan Kreativitas: Memiliki banyak strategi penanggulangan bencana dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi terutama pada upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan bencana.

2. Manfaat

- a. Meningkatkan Efektivitas: Memiliki banyak strategi penanggulangan bencana dapat meningkatkan efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan ketahanan daerah.
- b. Mengurangi Risiko: Memiliki banyak strategi penanggulangan bencana dapat memperkecil risiko kegagalan dan meningkatkan kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperkuat kapasitas daerah.

Selain menghadapi potensi bencana yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan tantangan kebencanaan dimasa mendatang, tantangan yang kedua adalah mewujudkan birokrasi pemerintah yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas dimana tantangan tersebut mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur agar mampu untuk mencapai tiap komponen terpenuhi, berkualitas dan terimplementasi dari Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja sehingga mendapat bobot penilaian yang maksimal. Target yang akan dicapai pada kinerja tahun 2025 – 2029, BPBD Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam predikat BB (Sangat Baik) atau Nilai antara > 70 – 80 dengan implementasi bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2 atau 3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi pengguna anggaran dalam mencapai kinerja,

memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/kordinator.

Irisan masalah-masalah tersebut diatas, kemudian dinarasikan secara sistematis menjadi 2 (dua) permasalahan pokok yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Permasalahan pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta akar masalah disajikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Ringkasan Permasalahan Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim

MASALAH POKOK	
Indeks Resiko bencana Provinsi kaltim berada pada kategori zona sedang	
MASALAH	AKAR MASALAH
Belum Tingginya Ketahanan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur, saat ini masih berada di level sedang dengan poin 0,51	1. Lemahnya kebijakan daerah dan kelembagaan tentang penanggulangan bencana 2. Belum optimalnya pepaduan rencana aksi daerah dalam pengurangan risiko bencana. 3. Belum optimalnya integrasi sistem informasi kebencanaan dan penguatan kapasitas sumber daya (manusia, logistik dan peralatan). 4. Belum terpadunya penanganan tematik kawasan rawan bencana 5. Rendahnya Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 6. Lemahnya kesiapsiagaan dan penanganan bencana 7. Lemahnya Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
MASALAH POKOK	
Nilai SAKIP BPBD masih dalam Katagori BB atau Predikat Sangat Baik	
MASALAH	AKAR MASALAH

Birokrasi pada BPBD Prov. Kaltim kurang terkelola secara administrasi	1. Belum mengacunya perencanaan kinerja pada sasaran kinerja 2. Belum optimalnya pengukuran kinerja secara berkala 3. Kurang terdokumentasinya data – data capaian kinerja dengan baik 4. Kurang optimalnya evaluasi akuntabilitas kinerja internal
---	---

Melihat kompleksitas kondisi masalah penanggulangan bencana, maka perlu adanya dorongan lebih kepada sinergi program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan dan Pemerintah Kabupaten/Kota, baik di tingkat operasional maupun koordinatif dalam penanggulangan bencana, begitu pula dengan masalah pada Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas.

2.2.1.4. Telahaan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam Ranwal Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengikuti visi dan misi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yaitu: "**KALTIM SUKSES MENUJU GENERASI EMAS**", dan misinya sebagai berikut :

- Misi Pertama : Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan Sejahtera
- Misi Kedua : Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat ekonomi baru yang inklusif berbasis Industrialisasi komoditas unggulan daerah
- Misi Ketiga : Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian, pelayanan publik dan kesehatan
- Misi Keempat : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, professional dan berintegritas berbasis teknologi informasi

Misi Kelima : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal

Misi Keenam : Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Menelaah ke enam misi tersebut diatas dan jika dihubungkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan mendukung pada misi yang keenam yaitu **“Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”** dengan program ke 11) **Peningkatan Mitigasi Penanggulangan Bencana.**

2.2.1.5. Telahaan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah sebuah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam melaksanakan penanggulangan bencana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019. Salah satu tugasnya adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Fungsi BNPB meliputi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Selain itu apabila terjadi bencana nasional, BNPB melaksanakan fungsi komando dalam penanganan status keadaan darurat bencana dan keadaan tertentu.

Sasaran Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana berpedoman pada arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 pada Prioritas Nasional ke-8, yaitu **Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**, dengan arah pembangunan berupa :

“Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim”

Sasaran Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengacu pada arah pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di atas, sehingga Sasaran Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana berfokus pada :

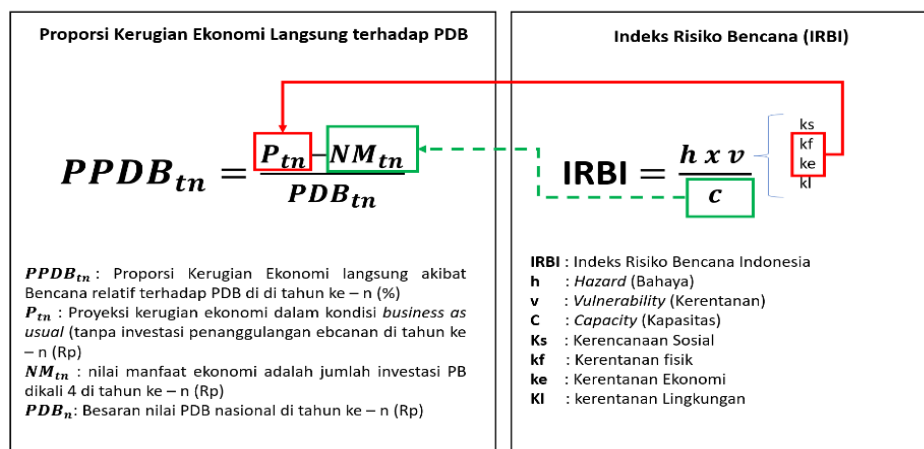
“Resiliensi Terhadap Bencana”

Indikator Kinerja Strategis:

- 1) Penurunan proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana, relatif terhadap PDB dari 0,137% menjadi 0,135%.

Penentuan target penurunan proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB dari 0,137% menjadi 0,135% dirumuskan oleh Bappenas berdasarkan pada laporan BNPB terhadap ketercapaian SFDRR serta perhitungan investasi di bidang bencana secara nasional. Kerugian sebesar 0,137% seutuhnya merupakan kerugian akibat bencana, dan belum termasuk perhitungan terkait kerugian iklim. Oleh karena itu, peran untuk mendukung ketercapaian indikator RPJMN ini akan diakomodasikan oleh BNPB. Selain berperan sebagai leading sector di bidang penanggulangan bencana, BNPB juga berperan untuk melaporkan ketercapaian ini sebagai perwakilan pemerintah Indonesia dalam forum SFDRR.

Gambar 2.3
Metode Perhitungan Indikator Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Terhadap PDB



- 2) Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana 1,2% setiap tahun.

Penentuan target penurunan indeks risiko bencana 1,2% didasarkan pada hasil capaian Indonesia sejauh ini pada Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana. Kerangka Kerja Sendai menuturkan beberapa tujuan yang perlu dihimbau oleh negara partisipan.

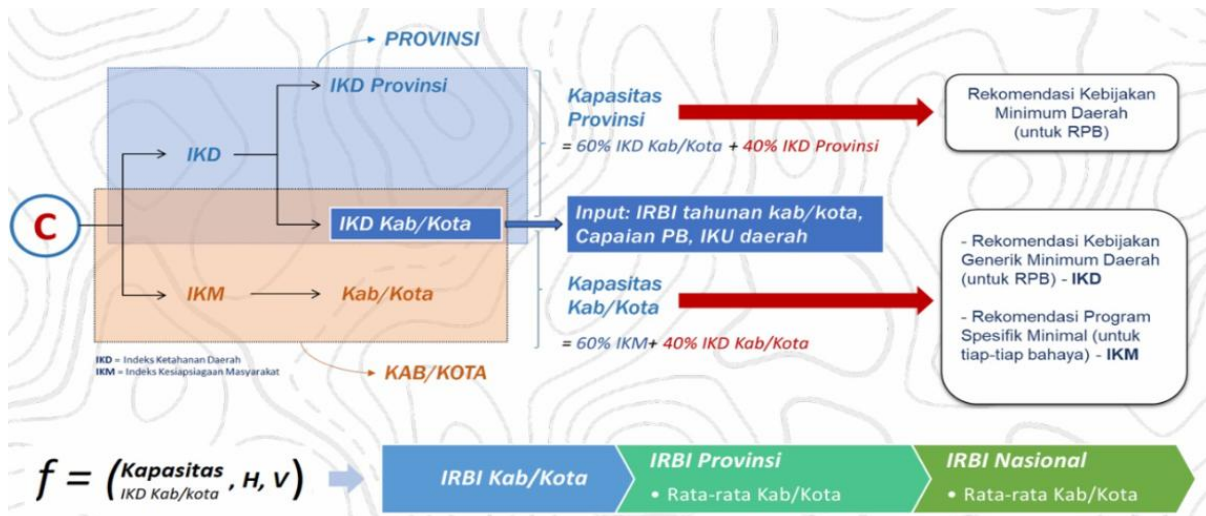
- 3) Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi dari 75,01 menjadi 79.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah alat ukur yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menilai kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Tujuan dari penilaian IKD untuk mengukur sejauh mana daerah mampu merespons dan mengelola risiko bencana serta menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan bencana atau dengan kata lain untuk mengukur keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana serta mengetahui prioritas rencana kegiatan dan program, yang berfokus pada 7 prioritas (Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan, Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik, Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana, serta Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana).

Indeks Ketahanan Daerah Provinsi merupakan hasil dari rata – rata capaian IKD Kabupaten/Kota, dimana kapasitas ketahanan daerah yang diukur diperoleh dari capaian kinerja Kabupaten/Kota. Peran Provinsi dalam memperkuat kapasitas ketahanan daerah juga memiliki peran penting yang telah diatur dalam mekanisme pembagian besaran porsi tugas, dalam rangka mempercepat peningkatan ketahanan daerah sebagaimana pada gambar dibawah.

Gambar 2.4

Peran Indeks Ketahanan Daerah dalam Kajian Risiko Bencana dan Indeks Risiko Bencana Indonesia



Sebagaimana gambar diatas bahwa peran provinsi dalam memeperkuat ketahanan daerah maksimal 40 % berupa rekomendasi kebijakan minimum penanggulangan bencana terhadap kebijakan dasar yang wajib atau sangat dianjurkan bagi pemerintah daerah agar mampu membangun ketahanan wilayah terhadap risiko bencana, antara lain :

1. Kelembagaan dan Regulasi

- Pembentukan dan penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007.
- Penetapan Perda tentang Penanggulangan Bencana.
- Integrasi penanggulangan bencana dalam RPJMD dan Renstra OPD.

2. Perencanaan dan Penganggaran

- Penyusunan dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) dan RAD PB (Rencana Aksi Daerah).
- Alokasi anggaran minimal untuk kegiatan penanggulangan bencana dalam APBD.
- Penggunaan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai alat ukur kapasitas.

3. Pemetaan Risiko dan Sistem Informasi

- Pemetaan risiko bencana berbasis desa/kelurahan.
- Pengembangan sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi dengan pusat data BNPB.

4. Partisipasi dan Edukasi Masyarakat

- Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana).
- Sosialisasi dan simulasi evakuasi rutin di sekolah, pasar, dan fasilitas publik.
- Pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen kebencanaan.

5. Kesiapsiagaan dan Respons

- Penyiapan rencana kontinjensi untuk bencana utama di wilayah.
- Pengadaan logistik dan peralatan tanggap darurat.
- Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan relawan kebencanaan.

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional dalam kurun 5 tahun. Dokumen ini adalah penjabaran RIPB Tahun 2020-2044 pada skala operasional periode 2025 - 2029. RENAS PB ditujukan seluruh instansi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat ataupun daerah, pemerintah maupun non pemerintah. Oleh karena itu rumusan arahan kebijakan dan strategi dalam Renstra BNPB Tahun 2025-2029 perlu mempertimbangkan arahan dari Renas PB Tahun 2025-2029. Rumusan Tujuan Penanggulangan Bencana dalam RENAS PB Tahun 2025-2029 yaitu:

“Meningkatkan Ketangguhan Bangsa dalam Mengelola Risiko Bencana untuk Mewujudkan Resiliensi Berkelanjutan”

Untuk menjawab sasaran RENAS PB Tahun 2025-2029, dirumuskan strategi konkrit yang merupakan implementasi dari arah kebijakan.

Tabel 2.10
Strategi Penanggulangan Bencana dalam RENAS PB Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Strategi
1	Mengurangi Jumlah Penduduk Terdampak Bencana melalui Peningkatan Kualitas Kesiapsiagaan, Peringatan Dini dan Penanggulangan Kedaruratan bencana	1. Meningkatkan aksesibilitas layanan & efektivitas pengelolaan sistem peringatan dini 2. Meningkatkan investasi dan peningkatan kapasitas sumber daya dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan bencana 3. Meningkatkan kesiapan dan keadaan logistik serta peralatan untuk penanggulangan kedaruratan bencana 4. Meningkatkan keterbukaan data dan informasi serta literasi kebencanaan untuk ketangguhan masyarakat & lembaga usaha
2	Mengurangi Dampak Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Melalui Peningkatan Efektivitas Upaya Pencegahan, Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	1. Meningkatkan investasi publik dan lembaga usaha berketahanan bencana & perubahan iklim 2. Meningkatkan pengembangan pusat pertumbuhan, perdesaan, dan kawasan investasi berketahanan bencana & perubahan iklim 3. Meningkatkan kesesuaian tata ruang darat dan laut serta ketangguhan & keandalan bangunan gedung 4. Meningkatkan perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana 5. Meningkatkan pemanfaatan skema perlindungan aset dan transfer risiko bencana oleh masyarakat dan lembaga usaha
3	Meningkatkan Daya Lenting di Daerah Terdampak Melalui Peningkatan Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis tata ruang dan pengurangan risiko bencana 2. Meningkatkan keterlibatan dan sinergi multipihak untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada seluruh aspek secara efektif
4	Meningkatkan Pelayanan dan Kapasitas Penanggulangan Bencana Melalui Transformasi Tata Kelola & Kolaborasi Multipihak	2. Membangun sistem regulasi yang handal dan terpadu dalam mendukung kinerja sistem penanggulangan bencana 3. Meningkatkan capaian penerapan SPM Sub Urusan Bencana 4. Meningkatkan ketersediaan SDM yang memiliki keahlian dan profesional di Bidang Kebencanaan 5. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menumbuhkembangkan industrialisasi kebencanaan 6. Meningkatkan kolaborasi dalam membangun ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat 7. Mengembangkan skema pendanaan inovatif dalam penanggulangan bencana 8. Meningkatkan kualitas pemantauan, pengendalian, dan evaluasi penanggulangan bencana 9. Meningkatkan advokasi resiliensi berkelanjutan di tingkat nasional & global

2.2.1.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berkaitan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan risiko bencana dalam manajemen risiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu

komitmen yang kuat dari semua pihak (stakeholders). Selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintahan pusat, daerah dan masyarakat. Sehingga secara substansial merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam menanggulangi dampak dan mengurangi risiko bencana secara komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistemik dalam menampung kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang komprehensif serta terpadu guna menjadi patokan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana selama 5 (lima) tahun ke depan secara bertahap.

Dalam upaya mewujudkan pemanfaatan ruang, terdapat beberapa proyek strategis nasional untuk percepatan dan pertumbuhan ekonomi - 312- Kalimantan Timur sesuai Perpres 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Perpres 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka investasi dan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlunya sinkronisasi RTRW Provinsi Kaltim terhadap Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) BPBD Provinsi Kaltim. Perlu adanya sinkronisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Kaltim yang di integrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltim.

Sebagai bagian dari upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai dasar perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis, perlu adanya penyusunan instrumen pengelolaan hidup dalam pengambilan kebijakan mengenai perencanaan pembangunan.

Terkait dengan telaahan terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029, berkenaan dengan upaya Pengurangan

Risiko Bencana, memotret permasalahan lingkungan hidup sesuai indikator yang berkesesuaian dan berkontribusi dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB/SDGs setiap tahun terbagi menjadi 4 kategori diantaranya :

- 1 SS : Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional;
- 2 SB : Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional;
- 3 BB : Indikator yang belum dilaksanakan;
- 4 NA : Indikator yang tidak ada datanya

Hal ini berdasarkan Mekanisme penyusunan laporan TPB/SGDs mengacu pada Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan TPB/SDGs yang telah dirilis oleh Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Edisi II pada bulan November tahun 2020.

Pembangunan di Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan TPB Nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan provinsi, saat ini dapat dikategorikan berdasarkan pilar-pilar pembangunan sebagaimana terbagi menjadi 4 pilar pembangunan, diantaranya: Pilar Pembangunan Lingkungan, Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, dimana pilar pertama dalam TPB yaitu Pilar Pembangunan Lingkungan meliputi Tujuan 6,11, 12, 13, 14 dan 15. Agenda TPB/SGDs 2030 yang berkaitan dengan kondisi lingkungan terdapat 6 TPB diantaranya air bersih dan sanitasi layak, Kota dan Permukiman yang berkelanjutan, Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, dan ekosistem daratan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berkesesuaian dengan Pilar Pembangunan Lingkungan berada pada tujuan ke 13 Yaitu Penanganan Perubahan Iklim Untuk mengantisipasi bencana akibat perubahan iklim yang merupakan tujuan ketiga belas SDGs tentang Penanganan Perubahan Iklim, maka perencanaan dan persiapan mitigasi bencana harus disiapkan sesuai dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana. Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Provinsi sebanyak dua dokumen (KRB dan RPB) pada tahun

2023 serta 70% pemerintah daerah telah mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana. Pada tahun 2022 penurunan emisi mencapai 36,79 juta tCO₂e, kontribusi sebesar ini merupakan hasil dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dalam pelaksanaan pengendalian emisi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Tantangan dalam penanganan perubahan iklim di Kalimantan Timur akan dihadapkan didalam situasi berikut:

1. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dengan segala dampaknya
2. Pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi fluktuatif dan masih bergantung pada sektor berbasis lahan, di mana pada tahun 2022, kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mencapai 53,24% dengan nilai PDRB, sedangkan L.U. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan hanya 7,04%

Rekomendasi Kebijakan dan Program RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana dengan arah kebijakan :

1. Rehabilitasi hutan dan penghambatan laju deforestasi dilaksanakan melalui peningkatan restorasi hutan dan lahan, penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan, penguatan kebijakan pelestarian hutan, dan pengembangan alternatif ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan.
2. Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem dilaksanakan melalui penguatan kerja sama antardaerah yang berada dalam satu kesatuan ekologi/ekosistem.
3. Pelestarian bentang alam dilaksanakan melalui perlindungan bentang sungai, gunung, bukit dan hutan yang dapat membentuk identitas wilayah. Perlindungan keanekaragaman hayati dilaksanakan melalui konservasi potensi ekosistem rentan. Penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal dilaksanakan melalui pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yang didukung inisiatif lokal dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional untuk melestarikan ekosistem
4. Pengembangan natural based solution untuk kebakaran hutan dilaksanakan melalui peningkatan pemahaman tentang nilai hutan,

peningkatan manajemen pengelolaan risiko kebakaran hutan, dan mendorong alokasi pendanaan penanganan kebakaran berbasis solusi alam

Dengan program utama adalah :

1. Program Penanganan Bencana.
2. Program Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.
3. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau
4. Program Pengelolaan Hutan

2.2.2. Isu Strategis

Dalam menentukan isu strategis yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan keterkaitan isu strategis lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.11
Matrix Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Provinsi Kalimantan Timur	Indeks Resiko bencana Provinsi kaltim berada pada kategori zona sedang	Perwujudan Kota dan Permukiman Berkelanjutan, Peningkatan Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Energi Bersih, dan Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab	Cuaca Ekstrem	Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global	Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar	Belum Optimalnya penyelenggaraan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Pengurangan Risiko Bencana terhadap Penguatan Regulasi, Perencanaan, Pencegahan, Pengurangan Risiko, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Mitigasi, Peringatan Dini dan kesiapsiagaan
					Masih rentannya ketahanan air, energi dan pangan	Belum Optimalnya penyelenggaraan Kedaruratan dan logistik dalam Pengurangan Risiko Bencana terhadap penguatan regulasi, sistem kaji cepat, mekanisme penetapan status darurat, penyelamatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
						dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar serta penguatan pusat pendalian operasi penanggulangan bencana.
						Belum Optimalnya penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pengurangan Risiko Bencana terhadap Penguatan Regulasi, data base aset dan kerugian, perkuatan kerjasama, serta monitoring dan evaluasi pemulihan pasca bencana

Untuk merumuskan isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kita perlu mengidentifikasi tantangan utama berdasarkan pada isu strategis lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) :

A. Global

Isu cuaca ekstrem dalam penanggulangan bencana semakin mendesak di Indonesia, terutama karena peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian yang dipicu oleh perubahan iklim global. Berdasarkan Fakta Terkini di Indonesia bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa cuaca ekstrem mendominasi kejadian bencana pada pertengahan Oktober 2025, termasuk hujan deras disertai angin puting beliung, perubahan iklim juga telah memperburuk pola cuaca ekstrem, seperti gelombang panas, hujan lebat, dan angin kencang.

Dampak yang ditimbulkan dari cuaca ekstrem tidak hanya menimbulkan kerusakan pada infrastruktur, namun juga menimbulkan korban jiwa dan luka, gangguan terhadap distribusi logistik dan layanan publik, penurunan produktivitas ekonomi, gangguan terhadap ketahanan pangan dan air dan peningkatan emisi karbon dan kerusakan ekosistem,

B. Nasional

Isu penerapan standar sustainability (keberlanjutan) yang tinggi di level global sangat erat kaitannya dengan penanggulangan dan mitigasi bencana. dimana isu utama yang muncul dari hubungan antara sustainability dan bencana diantaranya adalah ;

1. **Perubahan Iklim sebagai Pemicu Bencana**
Standar keberlanjutan global mendorong pengurangan emisi karbon dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Tanpa penerapan yang konsisten, risiko bencana seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan meningkat.
2. **Kesenjangan Implementasi antar Negara**
Negara maju cenderung memiliki sumber daya dan teknologi untuk menerapkan standar tinggi, sementara negara berkembang sering kesulitan memenuhi standar tersebut. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana.
3. **Keterkaitan SDGs dan Pengurangan Risiko Bencana**
Target-target dalam Sustainable Development Goals (SDGs), seperti pengelolaan air bersih dan pemukiman yang aman, sangat relevan dengan pengurangan risiko bencana.
4. **Tantangan dalam Pelaporan dan Assurance Keberlanjutan**
Banyak organisasi dan negara menghadapi tantangan dalam pelaporan keberlanjutan yang transparan dan akurat. Tanpa data yang jelas, sulit untuk mengukur dampak terhadap pengurangan risiko bencana.
5. **Forum Global untuk Resiliensi Berkelanjutan**
Forum seperti Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) membahas integrasi antara pembangunan berkelanjutan dan penanggulangan bencana. Ini menunjukkan bahwa standar sustainability bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal keselamatan dan ketahanan masyarakat.

C. Regional

Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas konektivitas antar wilayah dan infra-struktur dasar yang berhubungan dengan penanganan Peningkatan mitigasi Struktural maupun Non Struktural dalam Penanggulangan Bencana serta Adaptasi Perubahan Iklim melalui :

1. Identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan di seluruh wilayah Provinsi Kaltim untuk penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) di setiap daerah;
2. Penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di setiap Daerah;
3. Pembangunan infrastruktur (*building Rating, shelter Evakuasi*) terintegrasi yang bersifat multifungsi ((penyediaan layanan dasar, infrastruktur sosial (kesehatan, pendidikan), dan tanggap darurat bencana));
4. Peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana; (penguatan kelembagaan PD, Penguatan Regulasi, Sinergi pembiayaan, Kolaborasi Multipihak);

Masih rentannya ketahanan air, energi dan pangan (Pengembangan Solusi Berbasis Alam (Natural Based Solution) melalui sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan alam secara berkelanjutan serta pemulihan ekosistem alami dan ekosistem modifikasi yg efektif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan (alam) melalui :

1. Restorasi Sungai dan Penguatan Lereng
2. Pemantauan Berkala Hulu Sungai
3. Optimalisasi Pemanfaatan Air Permukaan
2. Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami
3. Revitalisasi tanggul, embung, waduk, dan Taman Kota
4. Konservasi vegetatif DAS rawan longsor
5. Konservasi vegetasi pasca Karhutla

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan, isu global, isu nasional, serta isu regional, dihasilkan 3 (tiga) isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya penyelenggaraan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Pengurangan Risiko Bencana terhadap Penguatan Regulasi, Perencanaan, Pencegahan, Pengurangan Risiko, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Mitigasi, Peringatan Dini dan kesiapsiagaan
2. Belum Optimalnya penyelenggaraan Kedaruratan dan logistik dalam Pengurangan Risiko Bencana terhadap penguatan regulasi, sistem kaji cepat, mekanisme penetapan status darurat, penyelamatan dan evakuasi,

pemenuhan kebutuhan dasar serta penguatan pusat pendalian operasi penanggulangan bencana.

3. Belum Optimalnya penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pengurangan Risiko Bencana terhadap Penguatan Regulasi, data base aset dan kerugian, perkuatan kerjasama, serta monitoring dan evaluasi pemulihan pasca bencana

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029 telah menetapkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode tahun tersebut terdiri dari 3 tujuan dan 11 sasaran sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terwujudnya Kaltim Sukses

- Sasaran 1 : Akselerasi Perekonomian Daerah
- Sasaran 2 : Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan
- Sasaran 3 : Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas
- Sasaran 4 : Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan 2 : Terbangunnya Generasi Emas

- Sasaran 5 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
- Sasaran 6 : Meningkatnya Kecerdasan Masyarakat
- Sasaran 7 : Meningkatnya Produktifitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia
- Sasaran 8 : Meningkatnya Akhlak dan Nilai Kebudayaan Masyarakat

Tujuan 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

- Sasaran 9 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme ASN
- Sasaran 10 : Meningkatnya Integritas Pemerintahan
- Sasaran 11 : Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi

Berdasarkan tujuan dan sasaran memiliki beberapa indikator dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029 dapat di lihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE	TARGET KINERJA					
		TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
KATA KUNCI VISI : KALTIM SUKSES								
Tujuan 1 : Terwujudnya Kaltim Sukses	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	3,90	3,92 – 3,95	3,95 – 3,97	3,97 – 3,99	3,99 – 4,00	4,00 – 4,01	4,01 – 4,05
Sasaran 1 : Akselerasi Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,17	6,17 – 6,40	6,40 – 7,20	7,20 – 8,30	8,30 – 8,50	8,50 – 8,60	8,60 – 8,75
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	18,26	18,26 – 18,28	18,28 – 18,46	18,46 – 18,74	18,74 – 19,27	19,27 – 20,03	20,03 – 21,04
	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,30*	3,35 – 3,40	3,40 – 3,45	3,45 – 3,49	3,49 – 3,53	3,53 – 3,57	3,57 – 3,62
Sasaran 2 : Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan	Tingkat Kemiskinan (%)	5,78	5,05 – 5,78	4,70 – 5,20	4,20 – 4,70	3,70 – 4,20	3,37 – 3,70	3,06 – 3,37
	Indeks Gini (Indeks)	0,321	0,310 – 0,321	0,313 – 0,318	0,308 – 0,313	0,303 – 0,308	0,298 – 0,303	0,293 – 0,298
Sasaran 3 : Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (Indeks)	7,89	7,89 – 8,01	8,01 – 8,13	8,13 – 8,26	8,26 – 8,38	8,38 – 8,50	8,50 – 9,00

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran 4 : Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	Indonesia <i>Blue Economy Index</i> (Indeks)	NA	27,04 – 32,92	32,92 – 38,81	38,81 – 44,69	44,69 – 50,58	50,58 – 56,46	56,46 – 62,35
	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (indeks)	63,04*	65,42 – 68,66	68,66 – 71,89	71,89 – 75,13	75,13 – 78,36	78,36 – 81,59	81,59 – 84,83
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	76,63	76,63 – 80,20	80,20 – 80,52	80,52 – 80,83	80,83 – 81,15	81,15 – 81,46	81,46 – 81,78
	Intensitas Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	38,59	38,59 – 40,82	55,05 – 60,70	60,70 – 60,80	60,80 – 65,90	65,90 – 67,46	67,46 – 72,63
	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	136,11	131,64 – 136,11	127,17 – 131,64	122,70 – 127,17	118,23 – 122,70	113,76 – 114,56	108,83 – 113,76
KATA KUNCI VISI : GENERASI EMAS								
Tujuan 2 : Terbangunnya Generasi Emas	Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,56*	0,59	0,60	0,61	0,61	0,62	0,63
Sasaran 5 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	74,94	74,94 – 75,17	75,17 – 75,40	75,40 – 75,62	75,62 – 75,85	75,85 – 76,08	76,08 – 76,31
	Prevalensi Stunting (%)	22,9	19,80 – 21,35	18,73 – 19,80	17,65 – 18,73	16,58 – 17,65	15,50 – 16,58	14,29 – 15,50

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran 6 : Meningkatnya Kecerdasan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,03	14,12 – 14,13	14,13 – 14,23	14,23 – 14,32	14,32 – 14,42	14,50 – 14,51	14,51 – 14,60
	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,02	10,55 – 10,57	10,57 – 10,75	10,75 – 10,93	10,93 – 11,10	11,10 – 11,28	11,28 – 11,59
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	13,11*	13,80 – 14,50	14,50 – 15,19	15,19 – 15,89	15,89 – 16,58	16,58 – 17,28	17,28 – 17,97
Sasaran 7 : Meningkatnya Produktifitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia	PDRB Per-Kapita (Juta Rp)	212,18	212,18 – 221,55	221,55 – 232,10	232,10 – 246,65	246,65 – 263,58	263,58 – 282,92	282,92 – 305,14
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,14	4,60 – 5,14	4,54 – 5,07	4,50 – 4,82	4,30 – 4,77	4,14 – 4,75	3,95 – 4,68
Sasaran 8 : Meningkatnya Akhlak dan Nilai Kebudayaan Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)	78,19	78,19 – 78,50	78,50 – 78,80	78,80 – 79,11	79,11 – 79,41	79,67 – 79,72	79,72 – 80,12
	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Indeks)	57,56*	58,80 – 58,84	58,84 – 59,46	59,46 – 60,08	60,08 – 60,69	61,18 – 61,31	61,31 – 61,93
KONDISI PEMUNGKIN PELAKSANAAN VISI : PEMERINTAHAN YANG BAIK								
Tujuan 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	85,16	85,16 – 85,84	85,84 – 86,53	86,53 – 87,22	87,22 – 87,92	87,92 – 88,63	88,63 – 89,34

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran 9 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme ASN	Nilai AKIP (Nilai)	78,50	78,50 – 79,19	79,19 – 79,78	79,78 – 80,36	80,36 – 80,95	80,95 – 81,54	81,54 – 82,13
	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	61,74	61,74 – 62,87	62,87 – 64,00	64,00 – 65,13	65,13 – 66,26	66,26 – 67,39	67,39 – 68,52
	Sistem Merit (Skor)	271*	279 – 286	286 – 294	294 – 301	301 – 309	309 – 316	316 – 324
	Indeks Pengelolaan Aset (Indeks)	2,26	2,26 – 2,33	2,33 – 2,40	2,40 – 2,47	2,47 – 2,54	2,54 – 2,61	2,61 – 2,69
Sasaran 10 : Meningkatnya Integritas Pemerintahan	Indeks Integritas Nasional (Indeks)	72,75	75,75 – 75,84	75,84 – 76,81	76,81 – 77,78	77,78 – 78,75	78,75 – 79,72	79,72 – 80,91
Sasaran 11 : Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,00*	4,03 – 4,06	4,06 – 4,09	4,09 – 4,12	4,12 – 4,14	4,14 – 4,17	4,17 – 4,20
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	3,79	3,79 – 3,85	3,85 – 3,91	3,91 – 3,97	3,97 – 4,03	4,03 – 4,09	4,09 – 4,15

Keterangan : *) Capaian Tahun 2023

Dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam **Sasaran 4** “Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan” dengan Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur “Tercapainya Pengurangan Risiko Bencana”.

3.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana

Sasaran 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik BPBD Prov. Kaltim

Adapun terkait indikator dan target tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tercapainya Pengurangan Risiko Bencana		Indeks Risiko Bencana (Indeks)	136,11	131,64 – 136,11	127,17 – 131,64	122,70 – 127,17	118,23 – 122,70	113,76 – 114,56	108,83 – 113,76	
	Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0,510	0,530	0,550	0,570	0,590	0,610	0,620	
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik BPBD Prov. Kaltim	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	71,95	72,00	73,45	75,20	76,95	78,70	80,45	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Indeks)	80	80	82	84	86	88	90	

3.3. Strategi

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu tentang upaya – upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mencakup arah kebijakan program dan kegiatan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ada beberapa strategi yang harus dilakukan antara lain :

1. Peningkatan sistem mitigasi dan peringatan dini yang andal, Inovatif, Kolaboratif dan Implementatif serta Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, Akademisi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana;
2. Peningkatan penanganan bencana yang cepat, tepat dan terkoordinasi, serta peningkatan pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar teknis pelayanan dan standar kebutuhan minimal;
3. Peningkatan layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Bencana dalam pencapaian kebutuhan dasar dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas;
4. Peningkatan kualitas layanan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian

Penahapan pembangunan merupakan salah satu bagian dari strategi yang menggambarkan arah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029. Adapun penahapan pembangunan RENSTRA secara indikatif :

Tabel 3.3
Penahapan Renstra

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Fondasi Regulasi Penanggulangan Bencana dalam memperkuat ketahanan daerah	Akselerasi Penanggulangan Bencana dalam memperkuat ketahanan daerah	Memperkuat kerja sama multi pihak dalam memperkuat ketahanan daerah	Memperkuat Sistem Informasi Kebencana dalam memperkuat ketahanan daerah	Kesinambungan ketangguhan menghadapi bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana

Sebagai salah satu strategi utama untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka lokus kegiatan akan dilaksanakan pada 10 Kabupaten/Kota dan menysasar pada masyarakat yang berada pada daerah rawan bencana, objek vital daerah, dan kawasan central ekonomi.

3.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan arah tindakan yang diambil untuk menentukan program – program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3.4
Arah Kebijakan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	ARAH KEBIJAKAN RPJMD
1.	Tercapainya Pengurangan Risiko Bencana	Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Peningkatan sistem mitigasi dan peringatan dini yang andal, Inovatif, Kolaboratif dan Implementatif serta Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, Akademisi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana	Penguatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana dikawasan rawan bencana	Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana
			Peningkatan penanganan bencana yang cepat, tepat dan terkoordinasi, serta peningkatan pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar teknis	Penguatan Kedaruratan, Logistik dan Peralatan dalam sistem Komando penanganan bencana	

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	ARAH KEBIJAKAN RPJMD
			pelayanan dan standar kebutuhan minimal		
			Peningkatan layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Bencana dalam pencapaian kebutuhan dasar dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas	Penguatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik BPBD Prov. Kaltim	Peningkatan kualitas layanan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian	Penguatan layanan kesekretariatan dalam capaian kinerja	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program

Untuk mencapai sasaran strategis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan beberapa program utama untuk dilaksanakan pada periode Renstra 2025 – 2029. Adapun rencana program utama yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan tujuan dan sasarannya berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

4.2. Kegiatan

Untuk mencapai program, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan kegiatan tindakan atau aktivitas yang berkaitan dengan tujuan, sasaran, dan program pada Pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
5. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7. Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah

8. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
9. Administrasi Umum Perangkat Daerah
10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.3. Sub Kegiatan

Untuk mencapai kegiatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan sub kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pada Pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
10. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian, Verifikasi Keuangan SKPD
11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
12. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
13. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD
14. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
15. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
16. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
17. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
18. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

19. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
20. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
21. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
22. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
23. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan Bangunan Kantor
24. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
26. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
27. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
28. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
29. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
30. Pengadaan Mebel
31. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
32. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
33. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
34. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
35. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
36. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
37. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
38. Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
39. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)
40. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
41. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana
42. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
43. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
44. Penyusunan Rencana Kontijensi
45. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
46. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
47. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
48. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
49. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
50. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

51. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
52. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
53. Penanganan Pasca Bencana Provinsi
54. Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi
55. Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi
56. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi
57. Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
58. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah
59. Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
60. Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
61. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
Tercapainya Pengurangan Risiko Bencana				Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
	Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana			Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)		
		Meningkatnya Ketangguhan dalam menghadapi bencana		Indeks Pra Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pasca Bencana	Program Penanggulangan Bencana	
		Terwujudnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana di Daerah		Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	
			Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	
			Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			bencana lintas Kabupaten/Kota	jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota		
		Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan di Daerah Rawan Bencana		Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
		Terlaksananya Pengendalian Operasi Penanganan Bencana dan Pengembangan Kapasitas Personil TRC		Persentase Pelayanan Penanganan Bencana		
			Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan- kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	
			Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota	mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana		
			Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	
			Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Penyusunan Rencana Kontinjensi	
			Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial personil TRC tingkat Provinsi untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	
			Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	
			Terbentuknya Sistem Komando Penanganan	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap (SOP) untuk pengendalian operasi yang sah dan legal dengan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Meningkatnya kemampuan dan keterampilan warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	
		Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			Bencana ke Tempat yang Aman			
			Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			Terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	
		Tersedianya Legislasi, Kelembagaan, dan Pembinaan Penanggulangan Bencana		Persentase Legislasi, Kelembagaan, dan Pembinaan Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
		Tersedianya Layanan Pasca Bencana		Persentase Layanan Pasca Bencana		
		Tersedianya Fasilitator Perhitungan Pasca Bencana		Persentase Fasilitator Perhitungan Pasca Bencana		
			Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun		
			Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	
			Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat, dunia usaha dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang terdaftar dan legal dalam penanganan pascabencana Provinsi	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			Tersedianya Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	
			Tersedianya regulasi di daerah untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	
			Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah dan dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik BPBD Prov. Kaltim			Nilai AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		
		Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) Perenstase Layanan yang Ditindak lanjuti	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Tersedianya Gaji, Tunjangan, dan Laporan Keuangan		Persentase ASN yg mendapatkan layanan administrasi Keuangan Tepat Waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian, Verifikasi Keuangan SKPD	
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Triwulanan/Semesteran SKPD	
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
		Terlaksananya penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		Terlaksananya kinerja pelayanan pegawai dan penataan pegawai		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
		Tersedianya fasilitas Operasional Kantor yang berkualitas		Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan Bangunan Kantor	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
		Tersedianya pengadaan Barang Milik Daerah yang dibutuhkan		Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Terlaksananya Kelancaran		Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
		kegiatan Urusan kantor				
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		Terwujudnya Kesiapan penggunaan Barang Milik daerah		Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Program Penanggulangan Bencana	Indeks Pra Bencana	N/A	0.383	2,550,000,000	0.396	2,080,497,628	0.414	2,605,172,441	0.429	2,609,172,441	0.430	3,171,006,929	BID PK
	Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan	N/A	0.115	1,328,996,221	0.118	886,589,831	0.119	1,124,896,564	0.123	1,126,896,564	0.125	1,382,275,877	BID KL
	Indeks Pasca Bencana	N/A	0.055	1,000,000,000	0.056	679,271,865	0.057	869,517,251	0.060	871,517,251	0.065	1,075,820,702	BID RR
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	494,198,220	100%	250,000,000	100%	246,000,000	100%	350,000,000	100%	250,000,118	BID PK
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	N/A	1 Doku men	334,992,200	1 Doku men	150,000,000			1 Doku men	100,000,000			BID PK
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	20 Orang	100 Orang	159,206,020	100 Orang	100,000,000	200 Orang	246,000,000	200 Orang	250,000,000	200 Orang	250,000,118	BID PK
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	1,115,965,180	100%	1,300,000,000	100%	1,200,000,000	100%	1,400,000,000	100%	1,500,000,000	BID PK
	Persentase Pelayanan Penanganan Bencana	N/A	100%	364,392,740	100%	244,589,831	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	455,379,436	BID KL
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan	2 Kawas an	244,701,860	1 Kawas an	100,000,000	2 Kawas an	200,000,000	2 Kawas an	200,000,000	2 Kawas an	200,000,000	BID PK
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur	400 Orang	500 Orang	423,322,020	500 Orang	200,000,000	500 Orang	200,000,000	500 Orang	200,000,000	1000 Orang	500,000,000	BID PK

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
	tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana												
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	N/A			1 Doku men	200,000,000			1 Doku men	200,000,000			BID PK
Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	N/A			1 Doku men	200,000,000	1 Doku men	200,000,000	1 Doku men	200,000,000	1 Doku men	200,000,000	BID PK
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	30 Orang	130,024,780	30 Orang	100,000,000	60 Orang	200,000,000	60 Orang	200,000,000	90 Orang	305,379,436	BID KL
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	60 Unit	200 Keluar ga	331,777,410	200 Keluar ga	400,000,000	200 Keluar ga	400,000,000	200 Keluar ga	400,000,000	200 Keluar ga	400,000,000	BID PK
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	13 Dokumen	12 Doku men	234,367,960	12 Doku men	144,589,831	12 Doku men	150,000,000	12 Doku men	150,000,000	12 Doku men	150,000,000	BID KL
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	20 Orang	100 Orang	116,163,890	100 Orang	200,000,000	100 Orang	200,000,000	100 Orang	200,000,000	100 Orang	200,000,000	BID PK
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	964,603,481	100%	642,000,000	100%	774,896,564	100%	776,896,564	100%	926,896,441	BID KL
Pencarian, Pertolongan dan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian,	12 Laporan	12 Lapora n	53,999,120	12 Lapora n	42,000,000	12 Lapora n	42,000,000	12 Lapora n	42,000,000	12 Lapora n	42,000,000	BID KL

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Evakuasi Korban Bencana	Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana												
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	400 Orang	665,661,901	400 Orang	400,000,000	500 Orang	500,000,000	500 Orang	500,000,000	500 Orang	650,000,000	BID KL
Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	10 Laporan	12 Lapora n	244,942,460	12 Lapora n	200,000,000	12 Lapora n	232,896,564	12 Lapora n	234,896,564	12 Lapora n	234,896,441	BID KL
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Legislasi, Kelembagaan, dan Pembinaan Penanggulangan Bencana	100%	100%	939,836,600	100%	530,497,628	100%	1,159,172,441	100%	859,172,441	100%	1,421,006,811	BID PK
	Persentase Layanan Pasca Bencana	100%	100%	644,702,494	100%	390,000,000	100%	450,000,000	100%	450,000,000	100%	525,820,702	BID RR
	Persentase Fasilitator Perhitungan Pasca Bencana	100%	100%	355,297,506	100%	289,271,865	100%	419,517,251	100%	421,517,251	100%	550,000,000	BID RR
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 Keluarga	100 Keluar ga	79,601,870	100 Keluar ga	100,000,000	200 Keluar ga	200,000,000	200 Keluar ga	200,000,000	200 Keluar ga	200,000,000	BID PK
Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	6 Dokumen	1 Doku men	477,086,020	1 Doku men	215,000,000	2 Doku men	250,000,000	2 Doku men	250,000,000	2 Doku men	275,820,702	BID RR
Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	N/A	1 Doku men	11,230,500	1 Doku men	100,000,000	1 Doku men	100,000,000	1 Doku men	100,000,000	1 Doku men	100,000,000	BID PK
Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	N/A	20 Lapora n	167,616,474	20 Lapora n	175,000,000	25 Lapora n	200,000,000	25 Lapora n	200,000,000	35 Lapora n	250,000,000	BID RR

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat, dunia usaha dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang terdaftar dan legal dalam penanganan pascabencana Provinsi	N/A	9 Lemba ga	162,543,994	9 Lemba ga	139,271,865	9 Lemba ga	200,000,000	9 Lemba ga	200,000,000	9 Lemba ga	250,000,000	BID RR
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	N/A	30 Orang	192,753,512	30 Orang	150,000,000	30 Orang	219,517,251	30 Orang	221,517,251	60 Orang	300,000,000	BID RR
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	1 Doku men	607,372,000	1 Doku men	180,497,628	2 Doku men	459,172,441	1 Doku men	159,172,441	2 Doku men	521,006,811	BID PK
Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	2 Dokumen	1 Doku men	138,858,110	1 Doku men	50,000,000	2 Doku men	200,000,000	2 Doku men	200,000,000	2 Doku men	200,000,000	BID PK
Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	1 Doku men	100,000,000	1 Doku men	50,000,000	1 Doku men	100,000,000	1 Doku men	100,000,000	1 Doku men	200,000,000	BID PK
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	10 Kab/Kota	10 Kab/K ota	102,774,120	10 Kab/K ota	50,000,000	10 Kab/K ota	100,000,000	10 Kab/K ota	100,000,000	10 Kab/K ota	200,000,000	BID PK
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	86.60 Indeks	85 Indeks	18,635,096,028	85 Indeks	18,492,976,279	85 Indeks	19,255,976,279	85 Indeks	19,657,976,156	85 Indeks	19,657,976,161	
	Perenstase Layanan yang Ditindak lanjuti	100 %	80 %	3,153,806,751	80 %	3,029,640,397	80 %	3,325,771,465	80 %	4,019,458,588	80 %	5,178,330,331	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	699,459,806	100 %	799,999,984	100 %	1,507,999,749	100 %	1,500,000,000	100 %	1,500,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Doku men	147,204,266	6 Doku men	164,944,444	6 Doku men	572,944,209	6 Doku men	564,944,460	6 Doku men	564,944,460	PRC

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Doku men	25,907,200	1 Doku men	25,907,200	1 Doku men	25,907,200	1 Doku men	25,907,200	1 Doku men	25,907,200	PRC
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Doku men	25,907,200	1 Doku men	25,907,200	1 Doku men	25,907,200	1 Doku men	25,907,200	1 Doku men	25,907,200	PRC
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Doku men	2,757,200	1 Doku men	2,757,200	1 Doku men	2,757,200	1 Doku men	2,757,200	1 Doku men	2,757,200	PRC
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Doku men	2,757,200	1 Doku men	2,757,200	1 Doku men	2,757,200	1 Doku men	2,757,200	1 Doku men	2,757,200	PRC
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	4 Lapora n	225,742,100	4 Lapora n	261,742,100	4 Lapora n	461,742,100	4 Lapora n	461,742,100	4 Lapora n	461,742,100	PRC
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Lapora n	269,184,640	3 Lapora n	315,984,640	3 Lapora n	415,984,640	3 Lapora n	415,984,640	3 Lapora n	415,984,640	PRC
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yg mendapatkan layanan administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	17,760,536,279	100 %	17,652,976,279	100 %	17,677,976,279	100 %	17,677,976,279	100 %	17,677,976,279	KEU
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Org/Bln	90 Org/Bl n	17,332,176,279	90 Org/Bl n	17,332,176,279	90 Org/Bl n	17,332,176,279	90 Org/Bl n	17,332,176,279	90 Org/Bl n	17,332,176,279	KEU
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	4 Doku men	295,800,000	4 Doku men	295,800,000	4 Doku men	295,800,000	4 Doku men	295,800,000	4 Doku men	295,800,000	KEU
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian, Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Doku men	38,382,888	12 Doku men	5,000,000	12 Doku men	10,000,000	12 Doku men	10,000,000	12 Doku men	10,000,000	KEU
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Doku men	67,200,000	12 Doku men	5,000,000	12 Doku men	10,000,000	12 Doku men	10,000,000	12 Doku men	10,000,000	KEU
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	2 Doku men	4,251,060	2 Doku men	5,000,000	2 Doku men	10,000,000	2 Doku men	10,000,000	2 Doku men	10,000,000	KEU

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Tanggapan Pemeriksaan													
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semeste ran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	4 Lapora n	20,561,760	4 Lapora n	5,000,000	4 Lapora n	10,000,000	4 Lapora n	10,000,000	4 Lapora n	10,000,000	KEU
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	4 Doku men	5,000,000	4 Doku men	5,000,000	4 Doku men	10,000,000	4 Doku men	10,000,000	4 Doku men	10,000,000	KEU
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	53,560,950	100 %	15,000,000	100 %	30,000,000	100 %	30,000,000	100 %	30,000,000	UM KP
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Doku men	2,660,100	1 Doku men	5,000,000	1 Doku men	10,000,000	1 Doku men	10,000,000	1 Doku men	10,000,000	UM KP
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Doku men	44,660,100	1 Doku men	5,000,000	1 Doku men	10,000,000	1 Doku men	10,000,000	1 Doku men	10,000,000	UM KP
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Lapora n	6,240,750	1 Lapora n	5,000,000	1 Lapora n	10,000,000	1 Lapora n	10,000,000	1 Lapora n	10,000,000	UM KP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	100 %	121,538,993	100 %	25,000,000	100 %	40,000,000	100 %	450,000,000	100 %	450,000,000	UM KP
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	1 Paket	96,934,493	1 Paket	5,000,000	0 Paket	0	2 Paket	200,000,000	0 Paket	200,000,000	UM KP
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	1 Doku men	5,932,200	1 Doku men	5,000,000	1 Doku men	10,000,000	1 Doku men	25,000,000	1 Doku men	25,000,000	UM KP
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	1 Doku men	6,136,200	1 Doku men	5,000,000	1 Doku men	10,000,000	1 Doku men	25,000,000	1 Doku men	25,000,000	UM KP
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	2 Orang	10,136,100	2 Orang	5,000,000	4 Orang	10,000,000	10 Orang	100,000,000	10 Orang	100,000,000	UM KP
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	2 Orang	2,400,000	2 Orang	5,000,000	4 Orang	10,000,000	10 Orang	100,000,000	10 Orang	100,000,000	UM KP

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Perundang- Undangan													
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	100 %	615,626,702	100 %	341,460,348	100 %	537,591,416	100 %	749,943,917	100 %	749,943,917	UM KP
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7 Paket	25,630,428	7 Paket	5,000,000	7 Paket	10,000,000	7 Paket	25,000,000	7 Paket	25,000,000	UM KP
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	7 Paket	95,246,505	7 Paket	5,000,000	7 Paket	40,000,000	7 Paket	100,000,000	7 Paket	100,000,000	UM KP
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket	7 Paket	50,478,274	7 Paket	5,000,000	7 Paket	10,000,000	7 Paket	25,000,000	7 Paket	25,000,000	UM KP
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	6 Paket	40,357,395	6 Paket	5,000,000	6 Paket	10,000,000	6 Paket	25,000,000	6 Paket	25,000,000	UM KP
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145 Laporan	4 Lapora n	390,000,000	4 Lapora n	316,460,348	4 Lapora n	457,591,416	4 Lapora n	549,943,917	4 Lapora n	549,943,917	UM KP
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	2 Doku men	13,914,100	2 Doku men	5,000,000	2 Doku men	10,000,000	2 Doku men	25,000,000	2 Doku men	25,000,000	UM KP
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 %	100 %	18,665,378	100 %	93,665,378	100 %	168,665,378	100 %	650,000,000	100 %	1,650,000,000	UM KP
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0 Unit	0	1 Unit	50,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	500,000,000	1 Unit	1,500,000,000	UM KP
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	1 Paket	18,665,378	1 Paket	18,665,378	1 Paket	18,665,378	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	UM KP
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	0 Unit	0	1 Unit	25,000,000	2 Unit	50,000,000	2 Unit	100,000,000	2 Unit	100,000,000	UM KP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor	100 %	100 %	1,805,427,400	100 %	1,805,427,400	100 %	1,805,427,400	100 %	1,805,427,400	100 %	1,805,427,400	UM KP
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Lapora n	10,698,524	1 Lapora n	10,698,524	1 Lapora n	10,698,524	1 Lapora n	10,698,524	1 Lapora n	10,698,524	UM KP
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Lapora n	429,008,876	12 Lapora n	429,008,876	12 Lapora n	429,008,876	12 Lapora n	429,008,876	12 Lapora n	429,008,876	UM KP

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Lapora n	1,365,720,000	12 Lapora n	1,365,720,000	12 Lapora n	1,365,720,000	12 Lapora n	1,365,720,000	12 Lapora n	1,365,720,000	UM KP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik Daerah	100 %	100 %	714,087,271	100 %	789,087,271	100 %	814,087,522	100 %	814,087,148	100 %	972,958,896	UM KP
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	44 Unit	44 Unit	580,042,098	44 Unit	580,042,114	44 Unit	580,042,349	44 Unit	580,041,975	44 Unit	580,041,980	UM KP
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	173 Unit	114,941,220	173 Unit	114,941,220	173 Unit	114,941,220	173 Unit	114,941,220	173 Unit	114,941,220	UM KP
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	3 Unit	19,103,953	3 Unit	19,103,953	3 Unit	19,103,953	3 Unit	19,103,953	3 Unit	19,103,953	UM KP
Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	0	1 Unit	75,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	258,871,743	UM KP

Keterangan :

1. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana merupakan sub kegiatan dimana rincian belanja berupa peralatan Penanggulangan bencana karena untuk meningkatkan efektivitas dan kesiapsiagaan operasional BPBD dalam menghadapi potensi bencana secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Program Penanggulangan Bencana	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Mendukung IKD
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Mendukung IKD
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Mendukung IKD
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Mendukung IKD
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Mendukung IKD
			Penyusunan Rencana Kontijensi	Mendukung IKD
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Mendukung IKD

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Mendukung IKD
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Mendukung IKD
			Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Mendukung IKD
			Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Mendukung IKD
			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Mendukung IKD
			Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Mendukung IKD
			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Mendukung SPM

4.4. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.4.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap instansi pemerintah pasti membuat indikator kinerja utama karena ada tujuannya. Adapun beberapa tujuan dibalik pembuatan indikator tersebut adalah :

1. Untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih organisasi tersebut selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi tersebut, utamanya kinerja para karyawan.
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal kinerja karyawan selama ini. Nantinya, informasi tersebut akan dijadikan salah satu pedoman dalam menyusun manajemen kerja yang baik.

Dalam penyusunannya, IKU harus memenuhi sejumlah kriteria, utamanya kriteria dari Perangkat Daerah. Kriteria-kriteria tersebut adalah :

1. Spesifik: indikator kinerja utama harus dibuat sespesifik mungkin dan juga harus mengacu pada hal yang akan diukur oleh indikator tersebut (dalam hal ini kinerja karyawan dan instansi terkait). Hal tersebut dilakukan agar orang-orang yang hendak menyusun IKU mempunyai persepsi yang sama terkait IKU yang mereka buat.
2. Measurable: IKU harus dapat diukur secara objektif, entah itu dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.
3. Achievable: data yang dipakai dalam IKU haruslah dapat dikumpulkan oleh pihak instansi terkait.
4. Relevant: IKU yang dibuat harus bisa menggambarkan kinerja sebuah instansi secara akurat dan relevan dengan kondisi riil instansi tersebut.
5. Timelines: IKU yang telah disusun harus bisa menggambarkan data berupa perkembangan kinerja suatu instansi dalam kurun waktu tertentu. Selain itu,

sedapat mungkin IKU bisa lebih fleksibel kalau nanti ada sejumlah perubahan di dalamnya.

Di Indonesia, ada beberapa jenis IKU yang lazim di pakai di beberapa instansi negara kita. Jenis-jenis IKU tersebut adalah :

1. Input Indicator: merupakan indikator yang menggambarkan secara ringkas seperti apa para karyawan baru di instansi tersebut, mulai dari kualitas hingga kuantitasnya.
2. Process Indicator: merupakan jenis IKU yang lazimnya dipakai sebagai acuan langkah untuk membuat sebuah jasa atau barang.
3. Output Indicator: merupakan jenis IKU yang mengukur output yang dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan suatu instansi.
4. Outcome Indicator: adalah jenis IKU yang mengukur sejauh mana perkembangan kinerja suatu instansi. Misalnya: kuantitas dan kualitas kerja, efisiensi kerja, serta perilaku SDM atau karyawan.
5. Effect Indicator: merupakan jenis indikator kinerja utama yang mengukur seperti apa dampak positif atau negatif dari kinerja suatu instansi terhadap instansi itu sendiri, atau pihak lain yang berkaitan dengan instansi tersebut.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan tahapan dalam penyusunan indikator Kinerja Utama dengan memilih dan menyandingkan seluruh indikator kinerja yang ada dan memastikan indikator tersebut merupakan indikator untuk mengukur kinerja yang menjadi core business Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	131,64 – 136,11	127,17 – 131,64	122,70 – 127,17	118,23 – 122,70	113,76 – 114,56	108,83 – 113,76	
2	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	0,62	
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,00	73,45	75,20	76,95	78,70	80,45	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	80	82	84	86	88	90	

4.4.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah metrik atau parameter yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi performa suatu organisasi, tim, atau proses terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menetapkan dan mengukur Indikator Kinerja Kunci (IKK) berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur masuk kedalam Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum seta Perlindungan Masyarakat.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 – 2029 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan direksi dan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2025 – 2029.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh jajaran dan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, karena juga berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi serta akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang telah disusun. Rencana Strategis ini bukan hanya sebagai administrasi saja, karena secara substansial merupakan cerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan tujuan dan sasaran daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 – 2029 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan – tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya **KALTIM SUKSES MENUJU GENERASI EMAS** melalui rencana tahunan dalam bentuk rencana kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 7 November 2025
Plt. Kepala Pelaksana,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

Yasir, S. E., M. Si
NIP. 19730405 1998031007